

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Retrieved from LHP LKPD: <https://jateng.bpk.go.id/lhp-lkpd/>
- Dien, Tinangon, & Walandouw. 2015. Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 534-541.
- Dona, E. M., & Verza A. L. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(2), 135-144
- Fathah, Rigel N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ebbank*, 8(1), 33-48.
- Forrester, J. P., & Mullins, D. R. (1992). Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. *Public Administration Review*, 52(5), 467-473.
- Garrison, Noreen, & Brewer. (2007). *Akuntansi Manajerial*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang *Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah*.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)*.
- Irfani, M., Pituringsih, E., & Husnan, H. (2020). Determinan Keberhasilan Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6).
- Juliani, H. (2020). Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2).

- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, (p. 995).
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK. 07/2020 tentang *Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional*.
- Lestyowati, J., & Kautsarina A. F. (2020). Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocusing Kegiatan di Masa Pandemi Covid 19: Studi Kasus BDK Yogyakarta. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, (p. 424).
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPF: Yogyakarta.
- Manoppo, M., Ventje I., & Victorina Z. T. (2017). Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Tahun Anggaran 2014-2015). *Jurnal EMBA*, 5(2), 2297-2306.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, Mulia P. (2003). Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. *Jurnal Forum Inovasi Desember-Februari 2003*.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia..
- Nurabiah. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 3(1).
- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2020 tentang *Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020*.
- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2020 tentang *Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020*.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang *Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2019 tentang *Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.07/2020 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional*.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang *Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Riska, Muttiarni, & Asriati. (2020). *Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Riyanto, Y. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63-78.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi, Mix Methods*. Bandung: Alfabeta

Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31-42.

Tanjung, A. H. (2006). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Ulum, M. B., & Ayu G. G. S. (2021). Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera Selatan. *Journal Management, Business, and Accounting*, 20(2), 111-122.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.